

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd



Modul Pembelajaran 1

Pendidikan Kewarganegaraan



E-Learning
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2018

MODUL 1

PENDAHULUAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bagian pertama ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa akan memahami betapa pentingnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di lingkungan Perguruan Tinggi agar pengetahuan (**knowledge**) dapat diimplementasikan secara baik yang tercermin pada sikap (**attitude**) dan perilaku (**psikomotor/softskill**) dalam kehidupan sehari-hari: bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

A. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Dasar hukum yang menjadi landasan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi. Telah diamanatkan bahwa dalam kurikulum pembelajaran di Perguruan Tinggi wajib memuat mata kuliah: Agama, Pancasila, **Pendidikan Kewarganegaraan** dan Bahasa Indonesia.

Asal muasal pendidikan kewarganegaraan berawal dari keberadaan sintesis atau **merger** dari dua substansi mata kuliah pokok yaitu; **pertama**, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. **Kedua**, **Kewiraan**. Keduanya dilaksanakan secara terpisah pada jenjang pendidikan yang berbeda juga. Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diberikan kepada siswa mulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Di beberapa perguruan tinggi ada yang menggabungkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sedangkan Kewiraan yang lazim disebut sebagai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) Tahap Awal, diberikan pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama tuntutan reformasi di segala bidang pada akhirnya mempengaruhi eksistensi dari kedua substansi mata kuliah tersebut. Sebagai konsekwensi logis, maka diadakan evaluasi dan koreksi total terhadap seluruh konteks materi pembelajaran sehingga menimbulkan beberapa penyederhanaan, oleh karena harus disesuaikan

dengan keadaan, situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat yang berkembang terutama pada awal era reformasi tahun 1998. Selanjutnya, pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) digabung dengan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang pembelajarannya diberikan pada jenjang pendidikan SD sampai dengan SLTA. Sementara **Kewiraan** berubah nama menjadi **Pendidikan Kewarganegaraan** yang diajarkan di Perguruan Tinggi dan terpisah dengan Pendidikan Pancasila.

Rekrutmen tenaga pendidik, para guru yang mengampuh mata pelajaran PMP berasal dari guru kelas untuk jenjang pendidikan SD dan guru mata pelajar yang berlatar belakang pendidikan S0 atau S1 bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) atau Pendidikan Moral Pancasila untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA. Bagi Para dosen Pengampuh mata kuliah Kewiraan rekrutmen awalnya berasal dari kalangan militer (TNI) dan polisi. Sehingga sangat terbatas keberadaan sumber daya dosen perguruan tinggi yang berbasis (spesialis) pengetahuan pendidikan kewiraan (pendidikan pendahuluan bela negara). Namun seiring dengan perkembangan zaman, dirasa kebutuhan tenaga dosen Kewiraan sangat diperlukan guna mengantisipasi dan memenuhi kekurangan dosen pengampuh mata kuliah ini. Menyikapi keterbatasan tenaga Dosen Kewiraan, maka Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu), membuka program pendidikan Calon Dosen Kewiraan atau disingkat SUSCADOSWIR yang terbuka bagi kalangan perwira TNI, Polisi dan Dosen PTN/PTS di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat untuk dididik di Lemhanas menjadi Dosen Kewiraan.

Maksud dan tujuan diadakannya **crash** program SUSCADOSWIR-LEMHANAS adalah menambah dan memenuhi kebutuhan dosen Kewiraan di PTN/PTS sekaligus untuk menghilangkan adanya **image atau persepsi** bahwa pembelajaran Kewiraan sebagai betuk doktrin militerisasi warga Negara sebab para dosen atau staf pengajar berasal dari kalangan TNI dan Polisi. Dengan keberadaan dan kehadiran para dosen sipil dari lingkungan perguruan tinggi, diharapkan mahasiswa dapat memahami sepenuhnya bahwa Pendidikan Kewiraan bukanlah pendidikan militerisasi melainkan pendidikan pendahuluan bela negara yang wajib dipelajari oleh setiap warga negara. Bukan juga sebagai doktrin wajib militer. Keniscayaan setiap warga negara berhak dan wajib bela negara merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 pasal 30 ayat (1). Oleh sebab itu semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali mempunyai hak dan kewajiban membela negara Indonesia.

Image dan kritik terhadap keberadaan pembelajaran Kewiraan di Perguruan Tinggi semakin berkembang dan tajam dari waktu ke waktu, terutama berasal dari kalangan **ilmuwan dan praktisi** yang belum mengetahui secara menyeluruh dan mendalam tentang duduk persoalan dan

esensi pembelajaran kewiraan. Sesungguhnya, esensi pembelajaran Kewiraan adalah untuk pembangun karakter bangsa dan pembentukan kepribadian mahasiswa agar menjadi ilmuwan dan/atau profesional yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air dan patriot sejati. Begitu kuatnya arus kritik ditambah dengan berbagai dorongan adanya kepentingan dalam era reformasi, maka pembelajaran kewiraan disederhanakan dan dirubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Sejak itu banyak sekali terjadi distorsi, baik terhadap Pendidikan Kewiraan maupun terhadap Pendidikan Moral Pancasila (PMP), serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewiraan di-**merger** menjadi satu dengan Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya, berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan dan diajarkan sejak duduk di bangku SD sampai Perguruan Tinggi. Secara kasat mata, ada beberapa esensi dasar pengetahuan yang ditiadakan berhubungan dengan moral Pancasila, begitu pula dengan beberapa bahan pembelajaran Kewiraan makin disederhanakan. Semua pengetahuan yang dipandang tidak relevan lagi dengan kondisi objektif zaman harus segera ditiadakan, seperti materi pembelajaran keberadaan “Dwi Fungsi ABRI” langsung dihilangkan. Namun pada kenyataannya, bukannya itu saja melainkan beberapa esensi dasar pengetahuan bela negara juga ikut tergerus seiring dengan penyederhanaan materi pembelajaran pendidikan pendahuluan bela negara (Kewiraan).

Hasilnya tentu sangat terasa, semenjak adanya reformasi 1998 pengamalan terhadap nilai-nilai moral Pancasila makin menipis. Para generasi muda hampir tidak paham tentang apa itu nilai-nilai Pancasila, bahkan ada kalangan artis yang “menghina” burung Garuda Pancasila. Singkatnya, nilai-nilai Pancasila semakin merosot tajam seiring dengan berjalanya reformasi dan makin terbuka lebar arus informasi, globalisasi dan demokratisasi. Begitu pula tatanan pendidikan pendahuluan bela negara (Kewiraan) makin tipis pemahaman terhadap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta rela berkorban.

B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Beberapa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi dirinci seperti berikut:

1. Memperkuat *softskill* untuk membentuk karakter ke-Indonesia-an dalam menghadapi tantangan dan peluang yang makin kompleks di abad 21.

Karakter ke-Indonesia-an semakin menipis akibat adanya kompleksitas pengaruh arus globalisasi yang tidak bisa dibendung dan juga berkembangnya sosial media yang sulit dikontrol, sehingga

mengerogoti serta mengikis moralitas, mentalitas, kepribadian, nasionalisme dan karakter bangsa Indonesia. Sedangkan abad ke-21 merupakan abad melinium ke-3, dimana setiap orang dipastikan sangat memerlukan **softskill** yang mampu mengahdapi peluang dan tantangan agar dapat hidup maju, berharkat, bermartabat dan sejahterah, namun tidak meninggalkan ciri khas kaharakter ke-Indonesia-an.

Softskill merupakan sikap dan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknogi, lingkungan global dan tuntutan zaman, sehingga mampu mengisi kedadupan dengan baik. Ada 10 (sepuluh) **softskill** yang harus dikuasai :

a) Keterampilan berkomunikasi (**communication skill**)

Bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa nasional Indonesia. Bahasa pemersatu ini, merupakan bahasa yang dipergunakan dalam berkomunikasi antar suku bangsa dan sebagai bahasa resmi. Artinya semua aktivitas yang berhubungan dengan acara-acara formal kenegaraan, seperti di sekolah-sekolah, kantor-kantor, sermonial, acara-acara resmi, dan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dihadiri oleh lintas suku bangsa, agama dan sosial budaya, maka wajib mempergunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi.

Namun demikian untuk menghadapi tantangan abad 21, yang serba kompetitif dalam bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan berkomunikasi bahasa internasional minimal mampu berbahasa Inggris. Akan lebih bagus lagi apabila ada bangsa Indonesia yang mampu berkomunikasi lebih dari satu bahasa internasional, misalnya bahasa Jerman, Prancis, Madari, Jepang dan lain sebagainya. Kemampuan berkemomunikasi seperti ini harus dimiliki, agar bangsa dan negara Indonesia dapat sukses dalam menghadapi tantangan dan persaingan bebas yang mendunia ini.

b) Kemampuan membangun hubungan baik (**interpersonal skill**)

Jumlah suku bangsa (etnis) di Indonesia sebanyak 1340 suku bangsa ditambah dengan suku bangsa keturunan yang sudah hidup di negara Indonesia sejak sebelum kemerdekaan yang sudah turun temurun, maupun yang baru datang setelah kemerdekaan namun telah menjadi warga negara Indonesia, yaitu warga masyarakat yang berasal dari keturunan Tionghoa, Arab, Eropa, India dan lain sebagainya adalah bangsa Indonesia.

Keanekaragaman suku bangsa serta ada perbedaan-perbedaan yang melekat pada kebiasaan-kebiasaan di setiap suku bangsa, akibat pembentukan budaya lokal, bila tidak diketahui, dimengerti dan dipahami, maka dapat menimbulkan gagal paham. Sebaliknya dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, diharapkan

semua suku bangsa dan warga keturunan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat saling mengetahui, mengerti dan memahami antara sesama warga negara Indonesia bahwa semua wargan Negara Indonesia adalah bersaudara. “*Torang semua bersaudara*” kata orang Medano. Pemahaman ini akan membangun hubungan baik antar sesame warga negara.

Kemampuan hubungan baik, tidak terbatas hanya pada konteks membina kerukunan berbangsa saja, tetapi hubungan baik antar negara juga harus dibina. Tentunya terhadap negara-negara yang memiliki kesepahaman yang sama, sehingga dapat dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan antar Negara.

c) Kemampuan memecahkan masalah (***problem solving skill***)

Setiap manusia yang sehat sudah diberikan kemampuan dalam memecahkan masalah, sebab manusia memiliki kelebihan dari pada mahluk-mahluk lain, yaitu manusia memiliki akal-pikiran. Namun demikian, tidak jarang manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik, bahkan menemui jalan butu. Manusia yang masuk dalam tipe ini, adalah manusia yang tidak mau, bukan “tidak mampu” dalam memecahkan masalah. Sebab mereka tidak suka atau tidak mau berpikir keras menggunakan akal dan tidak mau berusaha seoptimal mungkin untuk menemukan jalan pemecahan masalah. Ada kalimat motivasi “tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, meski harus berakhir dengan kematian”. Oleh sebab itu, kemampuan memecahkan masalah harus dilatih oleh setiap manusia dalam mengisi kehidupan di dunia.

Terkait dengan kemampuan memecahkan masalah, umumnya bangsa Indonesia sudah ada yang terlatih dalam menyelesaikan masalah. Secara historis, negara Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan salah satu wujud adanya kemampuan memecahkan masalah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, disampai sebagai anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia.

Baik secara Individual atau perorangan maupun kolektif, perlu dilatih dan dibiasakan untuk memecahkan permasalahan. Sebab permasalahan itu akan ada terus-menerus sepanjang masih ada manusia. Maka kemampuan menyelesaikan masalah dengan hasil *win-win solution* adalah suatu wujud kemampuan memecahkan masalah yang sangat bagus.

d) Kemampuan mendengarkan (***active listening skill***)

Salah satu kemampuan yang mudah tetapi terkadang sangat sulit dilakukan adalah kemampuan mendengar. Setiap manusia yang normal, memang diberikan indera pendengaran oleh sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa agar setiap manusia bisa dan mampu merespon terhadap apa yang mereka dengarkan. Jadi

dalam aktivitas sehari-hari kemampuan mendengarkan suara apa saja sudah menjadi fitra manusia, terutama bagi manusia yang alat pendengarannya masih berfungsi bagus.

Namun demikian, yang dimaksud kemampuan mendengarkan dalam konteks ini adalah kesediaan manusia yang secara ikhlas mau mendengarkan kritik dan saran baik yang bersifat menyakitkan maupun menyenangkan. Sebab tidak semua kritik dan saran bersifat menyenangkan, bahkan lebih banyak yang sebaliknya yaitu bersifat tidak menyenangkan. Dalam hal ini, manusia harus mampu untuk menahan diri dan mengedalikan diri, berpikir sehat dan kritis ketika mendengarkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang tidak menyenangkan. Jangan bertindak emosional, tetapi hadapi dengan tenang sampai berpikir sehat untuk mengambil hikmah dan pelajaran atas masukan kritik dan saran yang didengarkan itu.

Sebetulnya kemampuan berpikir sangat berguna bagi setiap manusia, namun secara khusus adalah bagi para pemimpin. Sebab setiap pemimpin sudah difitrahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak sempurna. Oleh sebab itu, untuk mendekati kesempurnaan, maka setiap pemimpin perlu memiliki kemampuan mendengarkan lebih baik dari pada yang bukan pemimpin.

e) Belajar sepanjang hayat (***active learning, life long education***)

Tidak akan noda satu bangsa (individual dan kolektif) berubah menjadi lebih baik, lebih maju dan sejahtera, apabila mereka tidak mengubahnya sendiri dengan cara belajar. Belajar tidak hanya dalam lingkup sekolah dan perguruan tinggi saja, tetapi belajar tidak hanya dalam lingkup sekolah dan perguruan tinggi saja, tetapi belajar bisa dimana saja dan dalam waktu yang tidak terbatas. Misalkan di dalam lingkungan alam dimana kita hidup, dimasyarakat, di tempat kerja, di organisasi dan lain sebagainya merupakan media bagi setiap manusia untuk belajar. Waktunya kapan saja misalkan pagi, siang malam, dalam kondisi masih anak-anak, remaja, pemuda, dewasa lansia dan sampai akhir hayat.

Belajar sepanjang hayat, bertujuan agar setiap manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan, situasi dan kondisi sehingga dapat bertahan hidup dengan lebih baik, berkembang, maju dan sukses. Manusia yang mampu beradaptasi adalah manusia yang bisa belajar secara baik, membaca lingkungan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab zaman akan terus mengalami perubahan. Setiap perubahan, pasti akan meninggalkan yang lama dan berubah menjadi yang baru. Oleh sebab itu, bila manusia tidak belajar, niscaya tidak akan mampu menyesuaikan diri terhadap kemajuan dan perubahan-perubahan tersebut.

f) Kemampuan mengorganisasi pekerjaan (**organizational skill**)

Setiap manusia, terlebih manusia yang sudah masuk dalam kategori modern, sudah memiliki kemampuan mengorganisasi dalam segala aktivitas kehidupan. Namun apakah kemampuan tersebut digunakan secara baik, atau sebaliknya tidak bisa memanfaatkan kemampuan mengorganisir, sehingga selalu gagal dalam mencapai tujuan. Setiap saat manusia dapat dipastikan selalu menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam kondisi yang serba terbatas. Terbatas kepemilikan modal, sumber daya manusia, sumber daya alam sebagai *in put* bahan baku pekerjaan, dan lain sebagainya.

Eksistensi keterbatasan itu, membuat manusia harus mampu mengorganisir pekerjaan dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu perlu ada aktivitas-aktivitas yang dikerjakan dengan prinsip-prinsip manajemen. Misalnya dengan menggunakan metode *planning, organizing, actuating* dan *controlling* (POAC). Membuat perencanaan yang baik dalam segala bidang pekerjaan, sebab dengan adanya perencanaan yang baik, sudah dapat diprediksi tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Perencanaan yang baik itu, sudah lebih separuh kesuksesan dicapai. Sebab perencanaan yang baik pada hakikatnya, sudah merupakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan, untuk menuju kesuksesan.

g) Kemampuan mengelola waktu (**time management skill**)

Salah satu alasan klasik, khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya (Jabodetabek) adalah macet. Penyebab ketidak-tepatan waktu atau keterlambatan waktu adalah macet sebagai kambing hitam. Namun permasalahan tidak tepat waktu, bukan hanya terjadi di daerah Jabodetabek saja, ternyata di luar wilayah tersebut hampir selalu terjadi di Suamtera, Kalimantan, Bali, Nusatenggara, Sulawaesi, Maluku, Papua dapat dikatakan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Perihal terlambat dan tidak tepat waktu sudah menjadi budaya tersendiri.

Dari beberapa kasus pertemuan rapat (meeting), diundang pukul 09.00 WIB pagi, ternyata nunjukkan jarum jam tepat waktu pukul 09.00 WIB makin lama makin bergeser ke arah mendekati pukul 10.00 WIB baru bebarap orang saja yang sudah hadir. Waktupun terus berjalan hingga menunjukkan pukul 10,00 WIB lebih, itupun belum lengkap undangan yang hadir namun rapat tidak bisa ditunda lagi dan harus dilaksanakan. Jadi sudah bergeser lebih satu jam acara baru dimulai, karena menunggu undangan yang terlambat, tidak tepat wakatu, alias tidak mempunyai kemampuan mengelola waktu.

Coba di renungka, andai ada seorang pengusaha. Katakan saja pengusaha “Kerupuk”, bila rata-rata sa pengusaha. Katakan saja

pengusaha “Kerupuk”, bila rata-rata satu detik mampu memproduksi satu kerupuk. Coba hitung berapa kerugian yang dialaminya akibat penundaan waktu, karena ketidak mampuan mengelola waktu. Baik kita hitung. Bila satu detik satu kerupuk diproduksi, berarti dalam satu menit ada 60 kerupuk yang diproduksi. Maka dalam satu jam diproduksi 3600 kerupuk. Bila harga satu kerupuk Rp. 1.000,- Dapat dihitung $60 \times 60 \text{ menit} = 3.600 \text{ kerupuk} \times \text{Rp. } 1.000 = \text{Rp. } 3.600.000,-$ Jadi dalam satu jam, bila tidak bisa mengelola waktu telah merugi sebesar Rp. 3.600.000. Belum produksi-produksi, dan jasa-jasa dan pekerjaan-pekerjaan lain, begit banyak kerugian akibat tidak bisa mengelola waktu.

h) Kemampuan kerja tim (**team player**)

Dua orang lebih baik dari pada satu orang, bahkan lebih banyak personal dalam satu tim diyakini hasilnya akan lebih baik. Betul, tetapi ada syaratnya yaitu harus memiliki kemampuan kerjasama yang baik, bukan kerja bersama-sama. Maknanya berbeda, kerja sama artinya mengerjakan satu pekerjaan dengan tujuan yang sama, setiap anggota tim dapat mengikuti, beradaptasi dan menghargai hasil kerja dalam tim. Bila ada yang tidak sependapat, tidak masalah dan itu hal yang biasa atau wajar saja. Namun tidak boleh menjadi permusuhan dan pertentangan apa lagi berusaha untuk menghancurkan tim kerja.

Sedangkan kerja bersama-sama bermakna bahwa kelompok orang ada pada suatu tempat tertentu, melakukan pekerjaan yang berbeda dengan tujuan pencapaian hasil pekerjaan yang berbeda pula. Sebab masing-masing bekerja secara individual dan hasil bekerjanya untuk kepentingan perorangan, bukan untuk tujuan yang kolektif. Hanya saja mereka bekerja secara bersama-sama dalam tempat dan waktu yang sama.

Bekerja dalam tim, membutuhkan sangat diperlukan, bukan hanya karena Indonesia sebagai negara yang plural yang didiami oleh beraneka ragam suku bangsa (etnis) dan warganegara keturunan, dan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Namun lebih dari itu, bahwa bekerja secara tim itu sangat baik. Proses dan hasilnya dapat berkualitas tinggi, sebab masing-masing anggota tim memiliki pendidikan, pengalaman dan kemampuan yang berbeda-beda dan dapat saling melengkapi ketika bekerja dalam tim.

i) Profesional (**professionalism**)

Menghadapi jaman melinea yang penuh tantangan, abad 21 dan era perdagangan bebas dewasa ini dan kedepan, memang perlu memiliki sikap yang profesional. Tidak bisa lagi, bekerja dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba konvensional. Sebab akan tertinggal tertinggal jauh kebelakang. Bekerja secara profesional tidak saja, hanya mampu menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba modern saja (cerdas intelektual), tetapi

perlu juga kecerdasan sikap mental dan spiritual, yaitu kecerdasan emosional dan matang dalam spiritual atau kecerdasan spiritual.

Perlunya memiliki kecerdasan IQ, EQ dan SQ tersebut, agar manusia tidak salah dalam mengambil keputusan dan kebijakan apalagi yang bersifat strategis. Sebab orang-orang profesional, bila bekerja pasti akan mampu mempertimbangkan segala sesuatu resiko yang akan didapat termasuk-dampak buruknya, bukan hanya yang berdampak buruk terhadap dirinya saja, tetapi juga dampak buruk bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu profesionalitas harus dilandasi oleh kecerdasan IQ, EQ dan SQ.

j) Kemampuan menyesuaikan diri (***adaptability skill***)

Dinosaurus punah, karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kalau binatang penyesuaian diri hanya terhadap lingkungan alam saja. Tetapi manusia tidak hanya sekedar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan alam, namun harus mampu juga beradaptasi terhadap sesama manusia, baik dalam lingkup daerah (lokal), nasional dan internasional, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban, situasi dan kondisi serta yang lainnya. Tujuannya agar dapat bertahan melangsungkan hidup dan kehidupan, serta meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, keamanan dan kebahagiaan.

Dalam konteks bela negara, setiap warga negara Indonesia diharapkan menjadi manusia Indonesia yang cerdas intelektual (IQ), cerdas emosional (EQ) dan cerdas spiritual (SQ). Sehingga dengan bekal itu, pada satu sisi dapat beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan zaman, masa kini dan masa datang, terhadap eksistensi situasi dan kondisi serta mampu menjaga lingkungan alam. Pada sisi lain, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, sukses dalam bekerja atau berkarir, berkeluarga dan memiliki sifat yang agamis, yang diimplementasikan dalam hubungan dengan alam semesta, manusia dan Tuhan Yang Maha Esa.

Orang Indonesia memang harus maju dan dapat menguasai segala ***softskill*** yang menjadi tuntutan kebutuhan dunia kerja, bisnis dan perdagangan, industri, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan rekayasa, dan yang lainnya, sehingga mampu berkompetisi dan sejajar dengan bangsa-bangsa negara maju. Akan tetapi tetap harus bercirikan khas Indonesia, berkarakter kebangsaan dan berwawasan nusantara.

2. Meningkatkan kemampuan daya pikir, rasa, dan perilaku yang bermartabat dalam membangun karakter bangsa dan lingkungan.

Transfer pengetahuan (***knowledge***), perbaikan sikap mental dan kepribadian bangsa (***attitude***), serta penguatan ***softskill*** merupakan

keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Transfer pengetahuan (**knowledge**) akan mendorong peningkatan daya pikir makin kritis dan cerdas, sehingga dipastikan akan memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbaiki sikap mental dan kepribadian bangsa (**attitude**) memupuk sikap yang kuat terhadap rasa cinta tanah air, nasionalisme dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Penguatan softskill mendorong terciptanya peluang dan kesempatan kerja, membangun dunia kerja, bisnis industri, perdagangan dan yang lainnya.

Setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi, dipastikan memilih salah satu disiplin ilmu dan mendalami keilmuan pada bidang yang dipilih. Ikhwal tersebut berkaitan erat dengan transfer pengetahuan, penguatan **softskill** dan **technical skill**. Sedangkan untuk membangun karakter bangsa diperlukan perbaikan sikap mental dan kepribadian (**attitude**) yang mempertebal semangat kebangsaan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mendalami pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Memantapkan kepribadian secara konsisten untuk mewujudkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat.

Dulu kepribadian bangsa Indonesia sangat terkenal di dunia sebagai bangsa yang bermartabat, memiliki kesantunan, keramah-tamahan, penyabar, peduli, ulet, tangguh, rukun, harmonis, agamais, patriotis dan lain sebagainya yang dikategorikan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan harkat kemanusiaan. Kepribadian seperti ini memang pernah konsisten eksistensinya di Indonesia, namun menjelang reformasi dan pada masa transisi, kenyataannya kepribadian bangsa seperti ini tergerus oleh adanya arus euforia reformasi sehingga mengikis dan meluluhlantahkan nilai-nilai kepribadian bangsa yang sudah melekat seperti bangsa yang digambarkan di atas.

Disamping faktor di atas, masih ada faktor yang menjadi pemicu tergerusnya kepribadian bangsa yang cenderung menjelma menjadi kebalikannya, tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma ketimuran khususnya bangsa Indonesia. Antara lain dalam waktu bersamaan terjadi gelombang globalisasi yang melanda dunia tanpa terkecuali negara Indonesia. Globalisasi memang telah menembus tembok-tembok keterisolasian dunia, bangsa dan masyarakat, sehingga pada satu sisi mempengaruhi mentalitas dan moralitas bangsa yang cenderung menjadi degradasi. Namun di sisi lain memberikan manfaat bagus juga, yaitu makin terbuka luasnya kompetisi ekonomi, percepatan transfer pengetahuan dan teknologi ke seluruh dunia. Fakta ini telah mendorong terjadinya perubahan sosial dan budaya bagi negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Perubahan ini pada akhirnya

dapat dipastikan menyentuh ranah kepribadian bangsa, merubah cara pandang, sikap dan perilaku manusia Indonesia.

Bersamaan dengan itu, kualitas dan derajat rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia makin menurun. Menurut Ryamizar Ryacudu (2015) berdasarkan hasil survey tentang kesetiaan warga negara terhadap negara, kesediaan dalam bela negara dan kemampuan mengaplikasikan wawasan kebangsaan; dari 105 negara ternyata negara Indonesia berada di urutan ke-96 dari belakang. Hasil kajian ini sangat mengecewakan bagi bangsa Indonesia, karena kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berada pada posisi rendah dalam kesetiaan dan kepatuhan membela negara. Fakta ini menunjukkan bahwa kepribadian bangsa Indonesia benar-benar telah mengalami kemunduran, sehingga perlu di **up-grade** untuk mengembalikan kondisi ideal kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

Rasa kebangsaan dan cinta tanah air, harus diimplementasikan secara konkrit. Sebagai ilustrasi, apabila kita cinta terhadap sesuatu : misalkan cinta keluarga, pacar, barang, hewan piaraan, kendaraan, harta benda dan lain sebagainya tentu kita akan bersikap dan bertindak menyayangi, melindungi, menjaga memenuhi kebutuhan, memperhatikan dan lain sebagainya. Bila yang kita cintai itu diganggu, dicuri, diancam, ditindas dan hal lain yang dapat mengancam dan membahayakan yang dicintai itu, pasti kita akan membela. Begitulah ilustrasi kalau mencintai tanah air berarti kita harus membela tanah air dari segala ancaman dan gangguan yang datang dari luar dan dalam negeri, baik langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan martabat bangsa.

C. Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbeda dengan pembelajaran ilmu pengetahuan yang memiliki objek kajian keilmuan, yang menuntut pendalaman dan penguasaan terhadap disiplin ilmu yang dipelajari secara teoritis. Pendidikan Kewarganegaraan bersifat aplikatif, berorientasi pada implementasi kehidupan nyata sehari-hari. Domain atau ranah perubahan sikap dan perilaku cinta tanah air dan bela negara lebih mendominasi, dibandingkan pendalaman disiplin ilmu. Sebab kajian Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multi-disiplin, sehingga transfer pengetahuan (**knowledge**) hanya sekedar pengantar pemberian wawasan sebagai modal dalam mengadaptif dinamika sosial dan mencari solusi terbaik dalam menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harmonis.

Untuk dapat mencapai kondisi capaian yang diharapkan dari **outcome** pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, maka pembelajaran harus berorientasi dan berpusat pada mahasiswa atau subjek didik. Pendekatan ini dikenal dengan istilah **Student Centered Learning (SCL)**, yaitu aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa dengan cara melatih berpikir kritis, analitis, induktif, deduktif, reflektif serta memicu **high order thinking** melalui dialog interaktif dan partisipatoris.

Sebagai konsekuensi logis dari tuntutan pendekatan SCL, maka penggunaan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks dan konten materi pokok bahasan dengan kondisi dan dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, dosen harus mampu memilih dan menentukan metode pembelajaran yang tepat pada setiap pertemuan tatap muka. Beberapa metode pembelajaran yang direkomendasi dapat meningkatkan tingkat partisipasi mahasiswa sekaligus mempercepat pemahaman mahasiswa adalah ceramah, tanya-jawab, diskusi, diskusi kelompok (FGD), ramu pendapat (**brainstorming**), pengkajian, survey lapangan, dan presentasi.

Metode ceramah diperlukan dalam rangka memberikan informasi, membuka wawasan dan transfer pengetahuan. Namun harus dibatasi, yang ideal hanya 25 % sampai maksimal 50 % dari total waktu setiap pertemuan tatap muka. Selengkapnya harus melibatkan partisipasi mahasiswa secara aktif dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi. Seperti tanya-jawab, diskusi, diskusi kelompok (FGD), ramu pendapat (**brainstorming**), pengkajian, survey lapangan, dan persentasi, yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

SOAL-SOAL

1. Apa dasar hukum yang tepat penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Indonesia ?
 - a. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1984
 - b. Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015
 - c. Peraruran Menristek Dikti Nomor 46 Tahun 2016
 - d. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1978

2. Embrio atau cikal bakal eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi berawal dari :
 - a. Hanya Pendidikan Kewiraan
 - b. Hanya Pendidikan Moral Pancasila
 - c. Hanya Pendidikan Pancasila
 - d. Sintesis atau merger Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Moral Pancasila

3. Pada masa awal pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewiraan, para dosen dominan berasal dari :
 - a. Dosen Sipil
 - b. Militer (TNI dan POLRI)
 - c. Sipil dan Militer
 - d. Profesional

4. Apa usaha pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Ristek dan Dikti) dan Lemhanas RI untuk memenuhi kebutuhan atas kekurangan tenaga dosen Pendidikan Kewiraan (sekarang Pendidikan Kewarganegaraan)?
 - a. Membuka Program S2 Bidang Pengkajian Ketahanan Nasional
 - b. Melaksanakan Pendidikan Kursus Dosen Kewiraan (Suscadoswir)
 - c. Memperkuat Program S1 dan S2 Bidang Pendidikan Moral Pancasila
 - d. Menyelenggarakan Pendidikan Profesional

5. Apa yang dimaksud dengan memperkuat *softskill* untuk membentuk karakter ke-Indonesia-an dalam menghadapi tantangan dan peluang yang makin kompleks di abad 21?
 - a. Salah satu dari tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan
 - b. Membangun moralitas, mentalitas, kepribadian, nasionalisme dan karakter bangsa Indonesia
 - c. Kemampuan awal bela Negara non fisik bagi warga negara Indonesia

- d. Pengetahuan dan keterampilan bela negara.
6. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, salah satu hasil akhir dari perubahan sikap yang diharapkan adalah Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan global, namun tetap memiliki jiwa kebangsaan yang kuat dan nasionalis. Istilah asingnya disebut dengan kemampuan
- Team player skill
 - Professionalism skill
 - Active listening skill
 - Adaptability skill
7. Salah satu sikap yang diharapkan dalam meningkatkan kemampuan daya pikir, rasa, dan perilaku yang bermartabat dalam membangun karakter bangsa dan lingkungan adalah
- Belajar sepanjang hayat
 - Selalu mempertebal semangat kebangsaan
 - Membuat sikap simpati meski bertentangan dengan nilai budaya bangsa
 - Profesional
8. Salah satu implementasi kepribadian yang dilaksanakan secara konsisten oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan rasa kebangsaan yang kuat adalah :
- Cinta tanah air sepanjang hayat
 - Ikut berpartisipasi bila ada kegiatan social kemasyarakatan
 - Belajar di Perguruan Tinggi
 - Bekerja secara professional dan bertanggung jawab

TUGAS TERSTRUKTUR PERTAMA

Pertanyaan dijawab di halaman ini secara perorangan dan dikumpulkan pada pertemuan berikut

1. Coba Anda jelaskan sejarah keberadaan pendidikan kewarganegaraan sehingga menjadi pembelajaran yang wajib di Perguruan Tinggi!
2. Jelaskan 10 (sepuluh) *softskill* yang harus dikuasai dalam menghadapi abad ke-21 dan berikan minimal 3 contoh yang relevan dengan tantangan yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cinta tanah air, berikan contoh yang nyata bila Anda cinta tanah air Indonesia!

Lembar Jawaban:

1. _____

2. _____

3. _____

Nama mahasiswa : _____ NIM : _____
Dosen : _____ Seksi : _____

DAFTAR PUSTAKA

- Arfani, Riza Noer. 2001. *Integrasi Nasional dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Sosial Politik UGM. ISSN. 1410-4946, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269)
- Bahar, Saafaroedin. 1996. *Integrasi Nasional Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. 2006. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- Kemendagri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.34/2006 Tentang Pedoman Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah*. Jakarta : Kemdagri
- Rawlins E.A. 1993. *Bentley's Textbook of Pharmaceutics 8th ed*. New York : Casell & Collin. Macmillan Publ. Ltd.
- Santoso dan Soewito Sutasoma. 1975. *A Study in Old Javanese Wajrayana*. New Delhi : International Academy of Culture.
- Soedarsono. S. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim Sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stuart and Sundeen. 1991. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing ed 4*. St Lous : The CV Mosby Year Book.
- Suroyo, Djuliaty. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, UNDIP Semarang.
- Subekti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Tilaar. HAR. 2007. *Mengindonesiakan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.